

**PERANAN DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR DALAM MENANGANI
MASALAH BANJIR TAHUN 2014**

(Studi Kasus Perumahan Graha Fauzan Asri)

Oleh :

Hendika Elfani Azlan

Email : Nkikaa@yahoo.com

Dosen Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Pekanbaru is the capital of Riau province who have serious problems with waterlogging and flooding at any time of the rainy season. Puddles usually occurs in areas of the drainage system is not functioning properly. While flooding is generally found in the area adjacent to the river flow. One of the flooded areas are quite alarming in the district of Bukit Raya from 2012 s / d 2013 there were at Graha Asri Village Fauzan Tangkerang Labuai. In carrying out the functions of government, one of the ways the City of dealing with the problem is to provide assistance in the form of long-term flood management, dredging the river. The purpose of this study was to determine the role of the Department of Highways and Water Resources as the City Government agencies Addressing Flood In 2014 at Graha Asri Fauzan and examines the factors supporting and inhibiting the realization of handling.

In this paper the authors study using qualitative analysis. While data analysis technique used is descriptive analysis of spoken words or behavior that can be observed from those studied. Based on the results of research conducted and followed by analyzing the data obtained by direct interviews with informants to produce 3 role in carrying out the implementation of government functions: (1) The role as a provider of public services, general services performed for the public who made the Department of Highways and Resources Air power in the form of the provision of administrative services. (2) The role as Executive Function Regulation, ie all flood mitigation work done by Regional Regulation No. 10 Year 2006 Pekanbaru on Water Resources and Infiltration Wells. (3) The role as Executive Planning and Coordination, the general handling of the flood which carried out the dredging of the River Sail which of the planning and the implementation is done by the Department of Highways and Water Resources in coordination with the village and sub-district. And in the implementation of the process there are factors that affect the supporting and workmanship.

Judging from these three roles, some disadvantages and advantages that made the Department of Highways and Water Resources Pekanbaru in addressing the problem of flooding in Fauzan Graha Asri housing in the district of Bukit Raya namely the lack, not the passage of cooperation between donor agencies and the advantages of building permits is fast responsiveness of Highways and Water Resources in dealing with the flooding problem Sail River dredging solutions.

Keywords: *Role, Flood, Government.*

Pendahuluan

Hujan bagi beberapa wilayah di Indonesia yang beriklim tropis bisa jadi merupakan anugerah tersendiri bagi masyarakatnya, namun pada beberapa wilayah perkotaan hujan bisa menjadi masalah atau bahkan musibah dikarenakan air hujan yang menggenang tidak dapat mengalir dengan baik sehingga menyebabkan banjir. Salah satu alasan hal ini dapat terjadi dikarenakan sistem drainase pada wilayah perkotaan tersebut tidak berfungsi dengan baik, rata-rata saluran tersebut tertutup oleh *paving block* bangunan ruko dan permukiman sehingga air hujan dapat menggenang cukup dalam, serta disepanjang saluran drainase terdapat gorong-gorong yang kurang berfungsi dan juga ditambah sedimentasi dan penumpukan sampah.

Saat hari hujan, wilayah diperkotaan yang berada dekat dengan sungai dan anak sungai dapat kebanjiran karena sungai tersebut meluap, ini memungkinkan jika permukiman yang dibangun tidak mempunyai jarak jauh dengan sungai tersebut dan terjadi pendangkalan sungai.

Pada Kota Pekanbaru permasalahan yang selalu terjadi dari tahun ke tahun adalah permasalahan genangan air dari limpasan drainase dan terhambatnya pengaliran air yang menjadi banjir. Tidak hanya pada daerah-daerah tertentu saja, di daerah perkotaan juga terjadi beberapa genangan air beberapa jam setelah hujan. Di daerah yang berdekatan dengan sungai sudah dapat dipastikan akan mengalami banjir jika kondisi sungai mengalami sedimentasi yang tebal dan permukiman yang dibangun dengan tidak mengikuti persyaratan pembangunan dari pemerintah.

Titik banjir yang menjadi target peneliti adalah wilayah Kecamatan Bukit Raya yakni pada Perumahan Graha Fauzan Asri di Kelurahan Tangkerang Labuai. Hal ini didasari oleh data yang diungkapkan oleh Kantor Camat Bukit Raya bahwa perumahan tersebut merupakan satu-satunya perumahan di Kecamatan Bukit

Raya yang mengalami masalah banjir selama dua tahun belakangan dengan jumlah warga rawan banjir terbesar di Kecamatan Bukit Raya. Berikut tabelnya:

Tabel A. Data Daerah Titik Rawan Bencana Di Kecamatan Bukit Raya

N O	KELURAHAN	LOKASI	JUMLAH KK	K E T
1	2	3	4	5
1	SIMPANG TIGA	1 JL. T. BEY RT. 04 RW. 17	47 KK	
		2 JL. Utama Simpang Jati RT. 03 RW. 10	13 KK	
2	TANGKERANG UTARA	1 JL. Kali Putih RT. 01 RW. 07	5 KK	
		2 JL. Harapan Raya Gg. Kembar RT. 04 RW 13	2 KK	
		3 JL. Lembah Raya RT. 02 RW. 14	4 KK	
		4 JL. Banda Aceh Gg. Hidayat RT 03 RW 15	6 KK	
		5 JL. Kencana Gg Kencana 5 RT 04 RW 15	9 KK	
		6 JL. Kencana Gg Kencana 6 RT 04 RW 15	4 KK	
3	TANGKERANG LABUAI	7 JL. Kencana Gg Kencana 7 RT 04 RW 15	20 KK	
		8 JL. Kencana Gg Kencana 8 RT 04 RW 15	5 KK	
		JL. Kesadaran Perumahan Graha Fauzan Asri RT. 01 RW. 10	50 KK	

Sumber: Kantor Camat Bukit Raya yang diakses pada 15 Oktober 2014

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian masalah-masalah tersebut maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian tentang :

- I. “Apa saja Peranan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Pekanbaru Dalam Menangani Masalah Banjir Tahun 2014 pada Kasus Banjir di Perumahan Graha Fauzan Asri?”

- II. “Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat Realisasi Penanganan Banjir pada perumahan tersebut?”

Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- I. Untuk mengetahui Peranan Pemerintah Dalam Menangani Masalah Banjir Perumahan Graha Fauzan Asri Pada Tahun 2014.
- II. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat realisasi penanganan masalah banjir dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Pekanbaru terkhusus Perumahan Graha Fauzan Asri di tahun 2014.

B. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian selesai, diharapkan dapat memberikan manfaat:

- I. Sebagai karya ilmiah dalam bentuk karya tulis guna menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis.
- II. Untuk mengetahui upaya dari Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air menangani masalah banjir di perumahan Graha Fauzan Asri, Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Tahun 2014.
- III. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian mengenai hal yang sama di masa yang akan datang.

Kerangka Teori

1. Peranan

Soedjono Soekanto (1990:268) berpendapat bahwa “peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan, sejalan dengan pendapat tersebut **Poerdawarminta (1991:735)** memberikan definisi peranan adalah “suatu yang jadi

bagian yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa)”.

Menurut **Soedjono Soekanto (1990:263)**, peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), artinya seseorang telah berperan apabila telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Peran dan status tidak dapat dipisahkan karena saling ketergantungan, tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Peran dapat mencakup tiga hal:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tempat seseorang dalam masyarakat;
2. Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat;
3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial bagi masyarakat.

Sedangkan fungsi dari peran yaitu diantaranya:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang atau organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kedudukannya dan berarti telah melaksanakan suatu peranan. Dimana kedudukan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air adalah sebagai unsur pelaksana yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang pekerjaan umum terkait sumber daya air.

2. Pemerintah Daerah

Pengertian pemerintah daerah berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan diatas maka yang pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (**Agustino, 2008:1**).

Menurut **M. Ryaas Rasyid (2000 : 63)** fungsi-fungsi pemerintahan regional dapat digolongkan dalam 5 pengelompokan, yaitu :

1. Fungsi penyediaan pelayanan, yang berorientasi lingkungan dan kemasyarakatan;
2. Fungsi koordinasi dan perancangan, terutama dalam investasi dan tata guna tanah.
3. Fungsi pengaturan, yakni perumusan dan penegakan peraturan-peraturan;
4. Fungsiperwakilan, untuk menyatakan pendapat daerah atas hal-hal diluar bidang tanggung jawab eksekutif;
5. Fungsi pembangunan, yaitu keterlibatan langsung pemerintah dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi.

Guna menunjang otonomi daerah ada beberapa asas-asas pelaksanaan dalam pemerintahan daerah, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Desentralisasi memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur daerahnya secara mandiri, karena kondisi sebenarnya yang terjadi di daerah hanya pemerintah daerah yang mengetahuinya lebih mendalam dan tentu saja akan bermanfaat dalam efektifitas suatu kebijakan yang mengatur masyarakat. Sedangkan dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari alat perlengkapan negara dipusat kepada instansi bawahan guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam menyelenggarakan pemerintahan (**Gadjong, 2007:89**).

Menurut **Ridwan (2010:126)** tugas pembantuan adalah pemerintah menugaskan kepada pemerintah daerah otonom untuk ikut serta melakukan kewenangan urusan pemerintah dengan batasan-batasan pertanggung jawaban, dimana pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara itu dalam Pasal 1 ayat 9 UU No.12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada kota dan atau desa serta pemerintahan kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Adapun pelaksanaan fungsi pemerintah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan dari pemerintah terhadap peraturan-peraturan yang telah ada dalam menangani masalah banjir di Perumahan Graha Fauzan Asri, yakni terkhusus dari pelaksanaan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya air bersama perangkat daerah dan masyarakat.

3. Koordinasi

Menurut **Taliziduhu Ndraha (2003:291)** bahwa “koordinasi adalah penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sehingga disisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada

pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan disisi lain keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang lain”.

Tujuan Koordinasi adalah :

- 1) Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan antar berbagai kegiatan dependen suatu organisasi.
- 2) Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- 3) Menciptakan dan memelihara iklim dan sifat saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda.

Adapun yang dimaksud konsep teori koordinasi disini adalah penyepakatan bersama baik dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan instansi pemerintahan yang berkaitan secara mengikat dalam berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sehingga tercapainya tujuan menangani masalah banjir pada perumahan Graha Fauzan Asri di Tahun 2014 ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Pekanbaru mempunyai kedudukan sebagai instansi atau organisasi publik yang melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang bina marga dan sumber daya air berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Bidang Sumber Daya Air merupakan bidang yang menangani masalah yang berkaitan dengan sumber daya air seperti, pengkoordinasikan, pembinaan dan perumusan kegiatan dalam rangka pengamanan dan pemanfaatan sungai, rawa, danau, air tanah, waduk dan sumber daya alam lainnya dan penanganan masalah banjir.

Pada bab pembahasan ini dimuat pemaparan yang diperoleh dari hasil

penelitian pada kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Pekanbaru. Data yang dibahas disini merupakan jawaban dari wawancara yang dilakukan terhadap informan yang telah ditentukan sebanyak 9 orang, terdiri dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Daya Air, Kepala Bidang Sumber Daya Air, Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Cipta Karya dan Perumahan, staf bidang Sumber Daya Air, mandor pengerukan sungai sail, Kasi Kantinratib Kecamatan Bukit Raya, Kasi Pemerintahan Kelurahan Tangkerang Labuai, RT dan Kepala Perumahan Graha Fauzan Asri.

Inti dari penelitian ini adalah peranan pemerintah terkait pelaksanaan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam menangani masalah banjir perumahan di Kecamatan Bukit Raya yakni dengan pengerukan Sungai Sail sepanjang 4 Km. Pemerintah Kota yang berperan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahannya adalah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, yang mengacu pada definisi Soedjono Soekanto: bahwasanya jika seseorang atau kelompok atau organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kedudukannya dan berarti telah melaksanakan suatu peranan.

Suatu peranan dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut yang salah satunya adalah : Peranan yang ideal (*ideal role*) dan Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*). Pelaksanaan suatu peran tertentu diharapkan sesuai dengan cara-cara yang diharapkan masyarakat. Pada pemerintahan, Teori Fungsi Pemerintahan menurut Ryaas Rasyid dapat dijadikan arahan dalam melaksanakan suatu peran, yakni dalam menjalankan Fungsi penyediaan pelayanan; Fungsi pengaturan; Fungsi koordinasi dan perencanaan, dan Fungsi Pembangunan. Dalam penelitian ini, Pelaksanaan Fungsi Penyediaan Pelayanan dapat dikategorikan sebagai Peranan Sebagai Penyedia Pelayanan Publik, Fungsi Pengaturan dapat dikategorikan sebagai Peranan Sebagai Pelaksana Peraturan, dan

Pelaksana Fungsi Koordinasi dan Perencanaan dapat dikategorikan sebagai Peranan Sebagai Pelaksana Koordinasi dan Perencanaan.

1. Peranan Sebagai Penyedia Pelayanan Publik.

Peranan sebagai penyedia pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air yakni pelayanan pemerintahan secara administrasi dalam pelaksanaan penanganan awal hingga akhir masalah banjir di perumahan satu-satunya yang terkena banjir saat hujan turun di Kecamatan Bukitraya, Perumahan Graha Fauzan Asri.

Pada pelaksanaan penanganan awal masalah banjir di perumahan Graha Fauzan Asri peranan yang dilakukan adalah dengan penanggapan langsung surat permohonan bantuan oleh Kelurahan dan warga perumahan kemudian langsung menindak terhitung dengan waktu perencanaan dalam waktu satu bulan setelah suratnya masuk ke dinas.

Penindakan yang dimaksud adalah pencarian sumber masalah atau akar permasalahan banjir yang terjadi di perumahan tersebut.

Akar permasalahan dari banjir setiap hujan di perumahan Graha Fauzan Asri adalah terletak pada konstruksi pembangunannya salah karena tidak mengikuti Surat Rekomendasi Banjir. Perlu diketahui, Surat Rekomendasi Banjir terdapat dalam Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air pasal 15, dikeluarkan bagi pemohon izin bangunan perorangan atau badan usaha yang akan mendirikan bangunan diwajibkan mendapatkan rekomendasi pencegahan banjir dari Dinas Teknis yang menangani pengembangan sumber air.

Dapat diketahui pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Dinas Sumber Daya Air, baik dari tahap awal yakni mengetahui sumber atau akar permasalahan banjir, lanjut ke tahap perencanaan penanganan banjir dengan

pengerukan Sungai Sail, kemudian ke tahap mengajukan anggaran dan sampai ketahap realisasi pelaksanaan pekerjaan operasional. Pelayanan oleh pemerintah untuk publik didasarkan karena negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dan pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan demikian pelaksanaan fungsi pemerintahan Dinas Sumber Daya Air yakni dari fungsi penyediaan pelayanan kepada masyarakat ini mengikuti prosedur peraturan yang berlaku di Pemerintahan Kota Pekanbaru maka dapat dikategorikan sebagai peranan sebagai penyedia pelayanan publik.

2. Peranan Sebagai Pelaksana Fungsi Peraturan

Dalam penanganan permasalahan banjir, terdapat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya air, termasuk diantaranya pencegahan banjir. Penanganan untuk jangka panjang yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota yang berkaitan dengan Sumber Daya Air, maka

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air melakukan berbagai bentuk konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan pemeliharaan sumber daya air. Yang mana terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan.

Peraturan daerah ini dibuat dengan menimbang bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan makhluk lainnya keberadaan dan keseimbangannya perlu dijaga dan dikendalikan dengan baik. Bahwa pengendalian Sumber Daya Air perlu dilaksanakan dengan terprogram agar sumber daya air dapat dijaga baik kesediaannya, keseimbangan serta dampak yang ditimbulkan oleh sumber dayaair tersebut terhadap lingkungan.

Dalam menangani masalah banjir, pencegahan diawal sudah dilaksanakan oleh dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. Berdasarkan peraturan yang telah ada, maka pelaksanaan Peraturan Daerah Tersebut telah diaplikasikan pada semua pemohon pembangunan yang ingin membangun dilahan dengan luas diatas lima ribu meter persegi.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa perencanaan dasar pembangunan sudah diberikan dan diingatkan kembali oleh Bidang Sumber Daya Air Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air guna memperkecil kemungkinan terjadi kesalahan yang merugikan masyarakat dimasa mendatang. Pemberian solusi sementara untuk banjir yang telah terjadi juga telah diberikan berdasarkan upaya dari Dinas supaya masyarakat bisa sedikit bernafas lega tanggul setinggi 3 meter disamping perumahan Graha Fauzan Asri tersebut.

3. Peranan Sebagai Pelaksana Fungsi Perencanaan dan Koordinasi.

Dalam perencanaan penanganan banjir di perumahan kecamatan Bukit Raya yakni perumahan graha fauzan asri dengan

membuat tebing dari tanah pada tahun 2013 merupakan penanganan sementara yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, penanganan untuk jangka panjangnya adalah dengan melakukan pengerukan (normalisasi) sungai.

Terkait penanganan dan pengendalian konservasi sumber daya air adalah dengan normalisasi sungai-sungai, pemasangan leoning atau talud atau biasa juga disebut brojong, dan rehabilitasi *leoning* guna memulihkan atau mengembalikan dan menjaga keadaan seperti semula. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air memiliki alat-alat berat tersendiri yang salah satunya adalah excapator L.200 yang digunakan untuk pengerjaan sungai dalam skala menengah.

Terkait penanganan dan pengendalian konservasi sumber daya air adalah dengan normalisasi sungai-sungai, pemasangan leoning atau talud atau biasa juga disebut brojong, dan rehabilitasi *leoning* guna memulihkan atau mengembalikan dan menjaga keadaan seperti semula. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air memiliki alat-alat berat tersendiri yang salah satunya adalah excapator L.200 yang digunakan untuk pengerjaan sungai dalam skala menengah.

Berikut adalah tabel Rakapitulasi Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan Operasional Alat Berat Tahun 2014.

Tabel B. Rakapitulasi Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan Operasional Alat Berat Tahun 2014.

N O	PEKERJA AN	VOLU ME M'	LOKASI KELURAHAN	KET
1.	Pengerukan Saluran Perumahan Bintan Jalan Teuku Bey Ujung	3.500	Simpang Tiga	Alat PC. 200
2.	Penggalian saluran Tanah Jalan Pemuda Ujung	500	Tampan	Alat PC. 200

3.	Penggalian Anak Sungai, Palas dan Saluran sdn 043 dan Pembuatan Badan Jalan LKMD	1.800	Palas	Alat PC. 200
4.	Penggalian Saluran dan Pembentukan Badan Jalan Mat Ali dan Jalan Pastoran	1.500	Palas	Alat PC. 200
5.	Penggalian saluran Perumahan Citra Sari RW.11 RT,03	1.500	Limbungan	Alat PC. 200
6.	Penggalian saluran Padat Karya, Jl.Latifa, anak sungai Pontong menuju Jalan Putri Ayu	2.300	Limbungan	Alat PC. 200
7.	Pembersihan dan meratakan Halaman Kantor Camat Tampan dan Penggalian Saluran Keliling Kecamatan Tampan	1.000	Tampan	Alat PC. 100
8.	Penggalian Parit Kiri kanan Jalan Swakarya/Taman Karya	2.000	Tuah Karya	Alat PC. 100
9.	Pembuatan Parit Keliling pengaman api agar tidak sampai keperumahan Warga	700	Tangkeran g Labuay	Alat PC. 100

10	Penggalian saluran kiri kanan Jalan menuju Jembatan Okura	11.000	Okura	Alat PC. 100
11	Penggalian saluran Jalan Rantau menuju Sungai Sail IV (parit Indah)	2.000	Simpang Tiga	Alat PC. 100
12	Penggalian saluran Primer Jalan Arifin Ahmad	1.000	Sidomulyo Timur	Alat Bachoe Loader
13	Penggalian saluran Jalan Punai	1.200	Tangkeran g Labuai	Alat PC. 100
14	Normalisasi Sungai Sail Induk	3.500	Tangkeran g Labuai	Alat PC. 200
15	Penggalian Saluran Primer Jalan Sekuntum RW.3	1.850	Tangkeran g Timur	Alat PC. 100
16	Penggalian Saluran Primer Jalan Singgalang menuju Sungai Sail V RW.7	1.000	Tangkeran g Timur	Alat PC. 100
17	Penggalian Parit Saluran dikawasan Tangkerang Tengah	2.000	Tangkeran g Tengah	Alat Bachoe Loader
18	Penggalian Anak Sungai Tenayan Desa Badak	2.500	Sail	Alat PC. 100
	Jumlah	40.850		

Sumber: Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, yang diakses tanggal 19 November 2014.

Dari tabel diatas dapat dilihat pada nomor 14 bahwa normalisasi sungai sail induk mempunyai jangkauan luas

sepanjang 3.500 m³ dengan penggunaan excavator L.200. Pengerjaan dengan luas 3.500 m³ yang dimaksud adalah normalisasi sungai dalam bentuk pengerukan sampai kedasar sungai, 500 m³ selanjutnya adalah pengerukan sekitar bibir sungai. Hal ini dikarenakan kondisi bibir atau tepian sungai berbeda disetiap meternya.

Penggunaan alat berat ini dianggap dapat mempercepat pengerukan sedimentasi setebal 3 meter dalam jangka waktu yang telah ditentukan yakni 3 bulan yang dimulai dari bulan Juni 2014. Namun pengerjaannya tidak sesuai dengan target rencana karena pengerjaan dilakukan kondisi cuaca, jika hujan maka pengerjaannya ditunda sampai hujannya berhenti. Berikut adalah tabel rekapitulasi pembangunan dan rehabilitasi *Leoning/Turap/Talud/Bronjong* tahun anggaran 2004 s/d 2012 dan tahun anggaran 2013 s/d 2014.

Normalisasi yang dilakukan dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air bukan hanya sungai sail saja tapi ada sekitar belasan sungai yang dibangun *Leoning/Talud/Bronjong*.

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam menyelesaikan permasalahan banjir berkoordinasi dengan Kecamatan Bukit Raya, Kelurahan Tangkerang Labuai dan masyarakat setempat. Koordinasi yang dilakukan bersama dilakukan guna mendapatkan penanganan banjir yang maksimal.

Koordinasi penanganan banjir menurut prosedur yang berlaku di Kota Pekanbaru adalah penanganan masalah dari pemerintah akan turun segera setelah masyarakat melapor. Penanganan banjir secara umum yang berkaitan dengan sumber daya air adalah adanya pelaporan dari masyarakat kepada Lurah setempat, kemudian dilanjutkan melapor ke Kecamatan, dan dari Kecamatan akan dirapatkan dan dibuat kesepakatan pada Musrimbang di Walikota. Setelah ditetapkan kesepatannya disusunlah kegiatan atau penanganan masalah dalam LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah) yang mana akan langsung dibagi pembagian kinerja berdasarkan instansi pemerintah yang bersangkutan.

Penanganan masalah banjir perumahan di Kecamatan Bukit Raya yakni pada Perumahan Graha Fauzan Asri, dianggap dapat memenuhi prosedur yang berlaku di Kota Pekanbaru. Sangat diharapkan penanganan banjir jangka panjang juga dilakukan bukan hanya tahun ini saja, teruntuk juga perumahan dan permukiman diwilayah lain di Kota Pekanbaru tahun mendatang.

Dikarenakan permasalahan banjir di pinggiran sungai ini bersifat *emergency* (mendesak) maka tindakan dari pemerintah kota yakni dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dianggap cukup cepat menangani permasalahan, yakni dengan langsung menanggapi pelaporan dari masyarakat setempat dan membuat pengerjaan penanganan masalah banjir terhitung setahun sebelum surat permohonan dari masyarakat setempat masuk ke Dinas.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Realisasi Penanganan Masalah Banjir Tahun 2014 di Perumahan Graha Fauzan Asri.

A. Faktor Pendukung

1) Dukungan dari Pemerintah Kota Pekanbaru dan Masyarakat.

Bahwa adanya kerja sama dengan Legislatif dan Eksekutif serta dukungan dari masyarakat dapat mempercepat pengerjaan dan penanganan masalah banjir perumahan Graha Fauzan Asri. Pemerintah Kota Pekanbaru bersama DPRD juga ikut turun langsung mengawasi jalannya kegiatan penanganan pengerukan Sungai Sail ini. Masyarakat juga ikut mendukung kegiatan dengan tidak mempersulit kegiatan alat-alat berat yang melintasi kawasan pekarangan rumah mereka.

- 2) Biaya Operasional Kegiatan Sesuai dengan Kebutuhan Lapangan.
- B. Faktor Penghambat.
- 1) Cuaca dan Alat-Alat Berat yang Kurang Memadai.
 - 2) Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah Tentang Penanganan Banjir.
 - 3) Kurangnya pengawasan pembangunan perumahan dan permukiman dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kesimpulan

Peranan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai instansi pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani masalah banjir Tahun 2014 (Studi Kasus Perumahan Graha Fauzan Asri) adalah sebagai pelaksana penyelenggaraan fungsi pemerintahan dibidang penyedia pelayan publik, pelaksana fungsi peraturan dan sebagai pelaksana fungsi perencanaan dan koordinasi. Pelaksanaan penyelenggaraan fungsi pemerintah dalam hal pembangunan telah dimaksudkan sama dengan pelaksana fungsi perencanaan dan koordinasi.

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam penanganan banjirnya telah mencari akar permasalahan sehingga dapat diketahui penyebab banjirnya. Banjir yang sering terjadi di Perumahan tersebut dikarenakan pengelola (*developer*) pembangunan tidak mengikuti Surat Rekomendasi Banjir yang telah diberikan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. Kemudian menindak lanjutkan dengan merencanakan kegiatan dan anggaran yang mana berkoordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan untuk tetap memberikan rekondisi dilapangan. Koordinasi yang dilakukan untuk anggaran, dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan Pemerintah Kota pada tahun 2013. Pada tahun 2014 pelaksanaan pengerukan Sungai Sail dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan November akhir yang mengalami keterlambatan dikarenakan

berbagai hambatan. Dalam pelaksanaan tentunya juga mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti dukungan dari masyarakat yang tidak mempersulit kerja alat-alat berat dilapangan.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan fungsi pemerintah terkait penanganan banjir di Perumahan Kecamatan Bukit Raya, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tentunya mempunyai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pengerukan sungai dilapangan. Penanganan banjir yang dimaksud dalam menangani masalah banjir pada perumahan adalah dengan pengerukan Sungai Sail sepanjang 4 Km. Banjir pada perumahan di Kecamatan Bukit Raya terjadi hanya pada Perumahan Graha Fauzan Asri selama dua tahun belakangan.

Faktor pendukung realisasi pengerjaan pengerukan Sungai Sail adalah adanya kerja sama dengan Legislatif dan Eksekutif serta dukungan dari masyarakat sehingga dapat mempercepat pengerjaan dan penanganan masalah banjir perumahan terkhusus pada perumahan Graha Fauzan Asri. Faktor pendukung lainnya adalah sesuai biaya operasional kegiatan yang dibutuhkan para pekerja dilapangan tentunya juga mempercepat proses pelaksanaan pengerukan Sungai Sail.

Faktor penghambat realisasi pengerjaan pengerukan Sungai Sail adalah kondisi alat-alat berat pengerukan Sungai Sail tidak bisa mempercepat pengerjaan karena sudah model lama. Penghambat selanjutnya adalah kondisi masyarakat yang tidak mengetahui batas-batas pembangunan permukiman dan perumahan pada garis sempadan sungai. Sosialisasi oleh pemerintah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan belum pada tahap yang maksimal. Sehingga kemungkinan besar akan memungkinkan terjadinya permasalahan yang berulang jika tidak ditindak oleh instansi pemerintah yang berwewenang. Faktor penghambat terakhir yakni masalah pengerjaan seharusnya dilakukan oleh Dinas Bina

Marga Provinsi bukan pada Kota, hal ini dikarenakan pengerjaan sungai yang berada dalam kota menjadi tanggung jawab Provinsi.

Daftar Pustaka

Buku :

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta : Jakarta.

Andi Gadjong, Agustian. 2007. *Pemerintah Dalam Kajian Politik Dan Hukum*. Ghalia Indonesia : Ciawi Bogor.

Bungin, Burhan. 2005. *Penelitian Kualitatif*. Kencana. Jakarta.

Burhan, M. 2007. *Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenada Media Group : Jakarta

Cholid, Sofyan. 2009. *Keluarga Dalam Perspektif Fungsional*. Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial UI : Jakarta.

Darmawan, edi. M.Eng. 2007. *Peranan Ruang Publik dalam Perancangan Kota (Urban Design) oleh semarang 1 September 2007*. Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang.

Daud silalahi, M. 2001. *Hukum Lingkungan Hidup: dalam sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, edisi Revisi. Alumni, Bandung.

Labolo, Muhadam. 2010. *MEMAHAMI ILMU PEMERINTAHAN Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Nawawi, Hadari, 2011. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press: Jogjakarta

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT Grasindo. Jakarta.

Nur, Sunadi, 2006. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara : Jakarta.

Rasyid, Muhammad Ryaas, 2002, *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi etika dan Kepemimpinan*, Pt Mutiara Sumber Widya, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajawali.

Soewargono. 1996. *Jatidiri Ilmu Pemerintahan*, IIP Press.

Sunarno, Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika Offset : Jakarta.

Suripin. 2004. *Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Supardi. 2006. *Metodologi Penelitian*, Yayasan Cendana Press : Jakarta.

Sutopo. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press : Surakarta.

Poewardaminta, W.I.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Widarta, I. 2005. *Cara Mudah Memahami UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Pondok Edukasi Puri Seon Asri Blok D23 Panggung Harjo Sewon : Bantul.

Jurnal dan Skripsi :

Mukti, Deri Satria. 2014. *Peranan Dinas Perhubungan Dalam Perizinan Angkutan Jalan (Studi Kasus Angkutan Becak Motor Di Kota*

Dumai Tahun 2012). Skripsi, Universitas Riau : Pekanbaru.

Hidayatullah, Rian. 2014. *Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan Dalam Membina Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru Tahun 2012-2013*. Skripsi, Universitas Riau : Pekanbaru.

Siregar, Herman, 2011. *“Pelaksanaan Fungsi Koordinasi dalam Penanganan Banjir di Kota Pekanbaru Tahun 2011”*. Skripsi, Universitas Riau : Pekanbaru.

Emirhadi Suganda, Yandi Andri yatmo dan Paramitha Atmodiwirjo, 2010. *Jurnal Pengelolaan lingkungan dan Masyarakat pada Wilayah Hilir Sungai, oleh Departemen Arsitektur*. Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, Depok 16242, Indonesia.

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi & Pemerintah daerah Kabupaten Kota.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian PU 2010-2014
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 239/KTS/1987 tentang Pembagian Tugas, wewenang & Tanggung Jawab Pengaturan, Pembinaan & Pengembangan Drainase Kota.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas dilingkungan Kota Pekanbaru.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan